



PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	889.037.475.196,00	954.152.639.760,36	107,32	755.201.585.504,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	76.123.190.545,00	71.716.807.185,36	94,21	70.463.588.604,55
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	55.000.000.000,00	51.201.717.358,35	93,09	44.358.891.984,28
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	10.818.416.634,00	10.333.404.603,00	95,52	9.185.511.299,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	3.268.125.144,00	3.268.125.144,00	100,00	2.791.696.245,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	7.036.648.767,00	6.913.560.080,01	98,25	14.127.489.096,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	785.343.986.651,00	855.504.974.297,00	108,93	668.624.066.900,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		717.083.950.037,00	800.025.357.594,00	111,57	626.040.818.119,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA		39.108.861.595,00	68.432.280.194,00	174,98	27.001.541.616,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		51.232.810.442,00	116.856.284.405,00	228,09	22.950.811.491,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		464.686.698.000,00	464.686.698.000,00	100,00	473.502.344.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA		111.120.285.000,00	109.894.596.163,00	98,90	52.742.868.744,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA		50.935.295.000,00	40.153.498.832,00	78,83	49.843.252.268,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		20.697.243.000,00	20.697.243.000,00	100,00	17.473.669.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA		20.697.243.000,00	20.697.243.000,00	100,00	17.473.669.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		47.562.793.614,00	34.782.373.703,00	73,13	25.109.579.781,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		47.562.793.614,00	34.782.373.703,00	73,13	25.109.579.781,00
	Bantuan Keuangan - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	27.570.298.000,00	26.930.858.278,00	97,68	16.113.930.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA		27.570.298.000,00	26.930.858.278,00	97,68	16.113.930.000,00
5	BELANJA	5.1.2	1.145.298.850.251,00	808.614.764.356,19	70,60	762.686.922.592,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	725.293.627.183,00	651.542.700.490,00	89,83	608.004.884.267,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	382.166.557.769,00	350.763.480.122,00	91,78	333.222.296.774,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	318.115.219.410,00	280.479.869.560,00	88,17	210.478.087.768,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.1.2	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	3.095.000.000,00	462.500.000,00	14,94	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	16.284.500.004,00	15.490.050.808,00	95,12	55.863.899.725,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	5.633.350.000,00	4.346.800.000,00	77,16	8.440.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	396.166.212.110,00	145.272.457.765,19	36,67	74.867.531.580,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	3.990.300.000,00	3.489.900.000,00	87,46	5.000.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	47.230.598.094,00	46.088.567.215,00	97,58	10.677.996.006,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	255.066.542.662,00	48.551.241.278,00	19,03	19.717.478.260,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	88.092.257.254,00	45.387.603.672,19	51,52	37.531.874.014,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.776.514.100,00	1.755.145.600,00	98,80	1.940.183.300,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	23.849.010.956,00	11.799.606.101,00	49,48	79.813.506.745,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		23.849.010.956,00	11.799.606.101,00	49,48	79.813.506.745,00
6	TRANSFER		0,00	0,00	0,00	702.060.808,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	702.060.808,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	702.060.808,00
7	PEMBIAYAAN	5.1.3	(256.261.375.055,00)	145.537.875.404,17	(56,79)	(8.186.397.895,45)
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		261.880.777.718,00	70.332.407.953,97	26,86	26.541.675.613,42
7.1.1	Penggunaan SILPA		11.380.777.718,00	7.752.828.612,97	68,12	26.495.206.938,42
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		250.000.000.000,00	62.500.000.000,00	25,00	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		500.000.000,00	79.579.341,00	15,92	46.468.675,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		5.619.402.663,00	3.562.000.000,00	63,39	6.974.500.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		4.619.402.663,00	2.619.000.000,00	56,70	6.000.000.000,00
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		1.000.000.000,00	943.000.000,00	94,30	974.500.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		256.261.375.055,00	66.770.407.953,97	26,06	19.567.175.613,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	212.308.283.358,14	0,00	11.380.777.717,97

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan 17 Agustus No. 98 Telepon 0431-8880205, Faksimile 0431-8880204, Manado 95113

Manado, 12 Mei 2022

Nomor : 256.B/S/XIX.MND/05/2022
Lampiran : Dua Buku
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.
Walikota Bitung
di
Bitung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2021, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung dengan memerhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib;
- b. Kekurangan volume atas pelaksanaan 13 paket pekerjaan belanja modal pada enam perangkat daerah sebesar Rp619.752.225,78; dan
- c. Penatausahaan kas tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bitung antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menetapkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp42.022.921,24 dan kekurangan penerimaan yang berasal dari sanksi denda sebesar

- Rp150.000.000,00** sampai dengan disetorkan ke kas daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp505.281.673,66** dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan memperhitungkan kembali dalam pembayaran termin berikutnya sebesar **Rp114.470.552,12**; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk mengevaluasi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penatausahaan kas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 14.A/LHP/XIX.MND/05/2022 dan Nomor 14.B/LHP/XIX.MND/05/2022 masing-masing bertanggal 12 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Bitung, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA

NIP. 197111291998031002

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kota Bitung.